

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pasca 19 tahun reformasi banyak perubahan dramatis di Indonesia. Semangat reformasi untuk menjawab persoalan hegemoni kekuasaan yang mengakar sekaligus menjalar di Indonesia. Reformasi menuntut tiga persoalan utama, yaitu terbebasnya Indonesia dari budaya KKN; Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merugikan masyarakat secara luas.

Hari ini justru fenomena korupsi makin mengkhawatirkan. Dalam sebuah pemberitaan di laman *Transparency International Indonesia* pada peluncuran *Corruption Perception Index* (CPI) 2016, Dadang Trisasongko (Jakarta, 25 Februari 2017) mengemukakan data sebagai berikut,

Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan skor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun

sedangkan menurut Lia Toriana dalam acara yang sama mengungkap data sebagai berikut,

Tahun 2016 ini, skor CPI Indonesia sebesar 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 1 poin dan turun dua peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tipis skor CPI Indonesia hanya mampu menyalip Thailand (35, turun) yang selalu berada di atas Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Kenaikan skor CPI ini belum mampu mengungguli Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, turun). Indonesia hanya sedikit lebih baik di atas Thailand (35, turun) dan Filipina (35, tetap), Vietnam (33, naik), dan Myanmar (28, naik), Kamboja (21, tetap).

Fakta tersebut menunjukkan statistik penurunan yang tipis dari indeks korupsi Indonesia secara umum, dan masih dibawah level perbaikan signifikan, diperkuat data kedua; gerak poin hanya mampu menyalip Thailand dan Philipina dan tidak lebih baik dari negara tetangga, Malaysia.

Kajian teoretis gejala tindakan koruptif dalam buku Mansyur Semma (2008, hlm.40) ditulis,

Gould dalam salah satu tulisannya, melukiskan tentang korupsi dalam standar kaum moralis dan sosialis. Bagi kaum moralis, korupsi diartikan sebagai penyimpangan individual, kegagalan moral di pihak individu yang berwatak lemah dan tidak terlatih dengan baik. Seseorang melakukan korupsi tidak lebih karena individu tidak mampu berhadapan langsung dengan realitas di luar dirinya..

Problem moral sebagai pemicu perilaku koruptif. Lemahnya pembinaan watak (:karakter) yang baik menjadi indikator penyebab. Dicermati pula bahwa entitas moral individu-lah yang berperan aktif.

Akibat korupsi adalah merobahnya budaya nepotisme tingkat partai pada lingkup nasional, daerah provinsi, kota dan kabupaten. Dilansir *Tempo.co.id* pada 7 Januari 2017, Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Adnan Topan Husodo, “terdapat 58 dinasti politik yang berkembang di Indonesia”. Angka yang muncul pada pemberitaan tersebut menyiratkan dominasi kekuasaan dimiliki oleh sekelompok orang di Indonesia. Mencermati berbagai pemberitaan *online* nepotisme pada wujud dinasti politik bertujuan memperbesar peluang terjadinya praktek korupsi yang memiskinkan rakyat. Selain itu bahaya perilaku koruptif menghadirkan perbuatan kolusif. Perilaku korupsi menanamkan sifat keserakahan, manipulatif, ketidakjujuran, konsumtif, tidak mau bekerja keras, serta menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginannya; cermin individu yang tidak bermoral.

Temuan di atas mencerminkan lemahnya moral sebagian manusia Indonesia. Oleh sebab itu harus terjadi langkah pembenahan konstruktif sekaligus struktural untuk mencegah merobahnya perilaku koruptif yang bersumber dari problematika moral.

Dunia pendidikan merupakan salah satu struktur sosial yang bergerak membina moral. Hari ini stigma dunia pendidikan di masyarakat dan pendidik berfokus pada pencapaian kognitif saja, yang ternyata tidak dapat menjawab persoalan fundamental manusia Indonesia, yaitu problem moral tadi. Menurut sejarawan Arnold Toynbee, “Dari 21 peradaban penting, 19 hancur bukan oleh penaklukan dari luar, tetapi oleh pembusukan moral dari dalam” (Lickona, 2004, hlm.12). Lemahnya moral sebagai pemicu runtuhnya peradaban, bahkan kecerdasan bukanlah *variable* penyebab yang signifikan. Menurut Plato dibanding kecerdasan, karakter merupakan hal yang utama. Hipotesis Plato tersebut terbukti

saat ini. Yunani sebagai kota yang melahirkan banyak pemikir dirontokkan oleh kebobrokan karakter manusianya. Dalam sebuah tulisan mengenai Analisis Tragedi Krisis Yunani (Syafiq, 2012, hlm.2-3) dituliskan tiga penyebab bangkrutnya perekonomian Yunani saat ini. *Pertama*, hutang-piutang pemerintah untuk menutupi berbagai pengelolaan negara termasuk Pegawai Negeri Sipil pasca bergantinya rejim junta militer menjadi sosialis. Negara tak dapat menutup hutang hingga terus menerus bertambah. Adanya manipulasi data kepada Goldman Sachs menambah ketidakpercayaan uni-eropa. *Kedua*, budaya praktik korupsi di jajaran pemerintahan dan birokrasi yang sarat dengan praktik KKN. Bahkan dikenal istilah “*fakelaki*” atau amplop kecil agar semua permohonan kepada pihak birokrat disetujui. *Ketiga*, selisih defisit nilai ekspor-impor ditenggarai sebagai penyebabnya; dana yang seharusnya dipakai menggenjot produktifitas ekspor malah dipakai untuk kegiatan konsumtif birokrat, yang sama sekali tidak produktif, dan diantaranya tentu saja praktek korupsi.

Kajian ilmiah memperlihatkan akibat mengerikan dari bekerjanya demoralisasi kolektif birokrat yang mampu menghancurkan tatanan kokoh bangsa dengan historisitasnya yang hebat. Lunturnya nilai-nilai mengakibatkan kerugian sosial yang berdampak masif.

Kosasih (Tanpa Tahun, hlm.1-2) mengutip pemikiran Foerster menuliskan empat ciri dasar pendidikan karakter, yang keseluruhannya menempatkan unsur nilai individu yang kokoh; sejalan dengan realitas sosial; normatif; baik dan murni bersumber pada gagasan otonomnya.

Problem moral berkait erat dengan lemahnya Nilai. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harga (kbbi.web.id, 30 maret 2017). Konsep Nilai yang abstrak menghadirkan bermacam-macam makna terminologis. Pemahaman Nilai dalam dunia pendidikan bertaut pada moral; moralitas dimaknai sebagai sesuatu yang berharga. *Paper* yang diterbitkan oleh Harvard dan Cambridge University menuliskan lima kuliah tokoh-tokoh pendidikan moral, yang mengungkap esensi etis sebagai pondasi Nilai paling subtil. Berikut tiga uraian dari lima uraian kuliah dalam *paper* tersebut:

1. Pemahaman James M Gustafson (1975, hlm. 12-14), pendidikan moral merupakan ajang pelatihan bagi siswa agar memiliki sikap tanggung jawab

moral, yang mewujud pada tindakannya. Menyadari tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat bernegara (*be a good citizen*). Selanjutnya moral yang dimaksud oleh Gustafson adalah hal-hal yang berkaitan dengan *ethics* dalam kerangka relijius.

2. Richard S Peters (1975, hlm.55) dalam kesimpulannya mengenai pendidikan moral diungkapkan, sebelum membicarakan mengenai pendidikan moral, haruslah didefinisikan terlebih dahulu mengenai konsepsi moral; apa kebermoralan?. Richard melihat, bahwa pendidikan moral merupakan bagian dari pergerakan pendidikan Liberal. Didalamnya Richard mengoreksi hegemoni kebenaran dalam semangat *science*, yang mengesampingkan eksistensi individu sebagai makhluk bermoral. Tegangan *science* dan moral terlihat pada dialektika sosial yang “dikesampingkan” dalam proses pencarian kebenaran *science*. Padahal tujuan akhir *science* berada pada titik sosiologis-antropologis.
3. Pendidikan Nilai memperkaya pengetahuan moral individu; individu dilatih pada sebuah situasi empiris. Lawrence Kohlberg (1975, hlm.58) menuliskan,

“first, virtue is ultimately one, not many, and it is always the same ideal form regardless of climate or culture. Second, the name of this ideal form is justice. Third, not only is the good one, but virtue is knowledge of the good. He knows the good chooses the good. Fourth, the kind of knowledge of the good which is virtue is philosophical knowledge or intuition of the ideal form of the good, not correct opinion or acceptance of conventional beliefs. Fifth, the good can then be taught, but its teachers must in certain sense be philosopher-kings. Sixth, the reason the good can be taught is because we know it all along dimly or at a low level and its teaching is more a calling out than an instruction. Seventh, the reason we think good cannot be taught is because the same good is known differently at different levels and direct instruction cannot take place across levels. Eight, then the teaching of virtue is the asking of questions and the pointing of the way, not the giving of answers. Moral education is the leading of men upward, not the putting into the mind of knowledge that was not there before”.

Kohlberg menganalisis pemikiran Socrates dan Plato, mengenai delapan elemen yang menjadi konstruksi pendidikan moral Platonic: *pertama*, kebajikan selalu merupakan bentuk ideal yang alamiah; *kedua*, bentuk idealitas tersebut adalah keadilan; *ketiga*, bukan tentang apa itu baik, tetapi juga pengetahuan tentang kebaikan. Dia yang mengetahui kebaikan akan

memilih yang baik; *keempat*, pengetahuan tentang kebaikan seperti pengetahuan filosofis, atau yang memiliki intuisi mengenai forma kebaikan ideal; *kelima*, kebaikan dapat diajarkan melalui seorang guru yang memiliki karakter filosof; *keenam*, kebaikan dapat diajarkan jika diketahui secara ‘kesamar-samaran’ atau pada level paling rendah; diajarkan dengan cara disampaikan bukan diinstruksikan; *ketujuh*, kebaikan tak dapat diajarkan, karena kebaikan yang sama dapat diketahui secara berbeda pada level yang berbeda pula, dan penyampaian secara langsung tidak dapat digantikan dengan melewati tahapan-tahapan empirisnya; *kedelapan*, mengajarkan kebaikan adalah dengan bertanya, bukan memberikan jawaban. Pendidikan moral membawa seseorang untuk naik satu level, bukan menempatkannya ke wilayah pengetahuan dimana mereka belum pernah berada disana sebelumnya.

Analisis Köhlberg diatas ---terlepas dari analisis *researchnya*--- mem-*frame* pendidikan moral Platonik memperlihatkan syarat pengembangan Pendidikan Nilai dikonstruksi secara empirik dengan pendekatan *ethics*; individu dilatih pada berbagai situasi moral.

Karlina Supeli (youtube.com, 5 September 2016) dalam sebuah orasi ilmiah menyampaikan,

Pendidikan yang ditarik dari implikasi objektif *science* etis-praktis --- dalam konteks publik--- bahwa saya ini warga negara, yang dilatih untuk tidak melihat kebenaran berdasarkan apa yang dia yakini, atau berdasarkan golongannya; warga negara dilatih secara konkret untuk mengakui realitas diluar dirinya. Dalam sistem pendidikan kita ilmu diajarkan sebagai alat, padahal ilmu memiliki tujuan etis ---melatih kesanggupan untuk melihat realitas, memilah-milah dan memilih---

Karlina mengungkap aspek pendidikan berperan dalam pengejawantahan makna etis bernegara pada konteks realitas majemuk sebuah bangsa. Pendidikan diharapkan menjadi sarana pengolahan jiwa dan raga dalam melihat esensi hubungan intersubjektif dan makna objektifitas dalam bingkai *ethics*.

Franz M Suseno (2016, hlm.xxvii) menuliskan pemaknaan etika sebagai berikut,

Etika bersifat reflektif atau metareal. Etika membahas bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan cara itu sendiri. Etika adalah ilmu yang mempelajari realitas, misalnya suatu sistem moral yang ada, tetapi tidak dapat menjadi sistem moral itu sendiri

Etika menyeleksi nilai melalui proses berpikir metafisis ---kerangka moral---, Nilai tidak dijadikan acuan “hukum” dalam sebuah lembaga, institusi bahkan negara, namun memainkan peranannya lewat dimensi *ethics*.

Seperti dikemukakan komite APEID (*Asia and The Pacific Programme of Educational Innovation for Development*) (UNESCO, 1994; Kosasih, Tanpa Tahun, hlm.11), Pendidikan Nilai secara khusus ditujukan untuk: (a) menerapkan pembentukan nilai kepada anak, (b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan (c) membimbing perilaku konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Dengan demikian tujuan Pendidikan Nilai meliputi tindakan mendidik pada usaha penyadaran Nilai sampai perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai. Huruf A hingga C melihat fungsi Pendidikan Nilai membentuk manusia yang diharapkan oleh masyarakat (negara) yang pada pencapaiannya; anak memiliki konsistensi terhadap nilai-nilai yang dianut secara mandiri. Pendidikan Nilai mengajak peserta didik pada dialektika kehidupan yang majemuk; empirik; dan moral-etik, dimana proses tersebut melahirkan manusia dengan kemampuan mengambil keputusan-keputusan baik, juga bertanggung jawab.

Negara secara makro maupun mikro merumuskan dasar-dasar nilai dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 dicantumkan, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Akar agama dan budaya yang ditautkan pada ideologi serta Undang-undang Dasar 1945 menjadi arah nilai dalam menghadapi berbagai perubahan zaman yang dinamis.

Kebijakan Pemerintah memaknai nilai sebagai fundamen karakter warga negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 17, tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 bab IV,

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Serta pada point A. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Pada tataran mikro pendidikan melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 156928/MPK.A/KR/2013 pada tanggal 8 Nopember 2013 menyatakan, mulai tahun pelajaran 2014/2015 seluruh SMA sejumlah 12.637 wajib melaksanakan Kurikulum 2013 di kelas X dan kelas XI. Kaitan kurikulum 2013 meng-konsentrasikan penilaian karakter dalam perumusan kompetensi inti yang harus dimiliki peserta didik. Penilaian pada dimensi *religious* masuk kedalam K1 dan K2 yang memuat penilaian pada dimensi sosial peserta didik. Penanaman maupun pengembangan Nilai dalam rumusan kurikulum 2013 bernuansa sangat kental, sebab pencapaian karakter yang diharapkan dapat ter-realisis hanya melalui penanaman dan pengembangan Nilai.

Rumusan kompetensi yang relevan bagi kelas X sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi telah disesuaikan kedalam perumusan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut;

1. Kompetensi Sikap Spiritual. Deskripsi kompetensinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Sikap Sosial. Deskripsi kompetensinya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, *responsive* dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Kompetensi Pengetahuan. Deskripsi kompetensinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Kompetensi Keterampilan. Deskripsi kompetensinya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan

Pengelompokkan aspek penilaian dalam kurikulum 2013 menempatkan kompetensi inti satu (K1) dan kompetensi inti dua (K2) sebagai konstruksi awal penilaian maupun pengembangan strategi pendidik dalam proses pembelajaran. K1 *output*-nya mengarahkan pada sikap religious peserta didik. Dalam prosesnya diintegrasikan nilai agama dalam konteks materi pembelajaran. K2 *output*-nya peserta didik memiliki sikap sosial. Dimensi sosial manusia dibangun bersumber pada nilai kebajikan individu. Oleh karena itu dibutuhkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki sikap sosial yang baik.

Praktek pembelajaran bahasa asing dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, menurut seorang guru bahasa Jerman di SMA PGII I Bandung, yang telah mengajar lebih dari 20 tahun mengungkapkan peranan pembelajaran bahasa asing (Bahasa Jerman) umumnya masih difokuskan pada kemampuan kognitif; *übersetzen* (menerjemahkan), dan *grammatik* (tata bahasa). Pada tataran afektif; *übungen* (latihan-latihan) serta tataran psikomotor; *ausprache* (pengucapan) dianggap sebagai aksidensi dari kemampuan kognitif.

Di SMA PGII I Bandung pada tahun 1996 dibuka jurusan bahasa untuk kelas XII. Spesifikasi bahasa yang diajarkan adalah bahasa Jerman. Jurusan Bahasa langsung mendapatkan apresiasi dan prestasi positif dari pihak sekolah maupun di luar sekolah. Sederet prestasi dan kemampuan meraih nilai tertinggi pada ujian nasional bahasa Jerman se-kota Bandung.

Pada tahun 2006 pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Jerman di SMA PGRI I Bandung masuk dalam kurikulum umum. Tahun 2008 SMA PGRI I Bandung terpilih sebagai salah satu sekolah mitra yang diprakarsai oleh dua institusi pendidikan lintas Negara yaitu *Deutsch Pasch Schule* (Jerman) dan SMA PGRI I Bandung (Indonesia). Bahasa Jerman yang termasuk dalam kategori pembelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa Arab memberikan kontribusi positif bagi peserta didik sekaligus menambah nilai market sekolah dalam bidang kebahasaan. Masuknya Bahasa Jerman ke dalam kurikulum umum semakin menambah deretan prestasi yang diraih peserta didik, diantaranya mencatatkan SMA PGRI I Bandung setiap tahun mampu menjuarai Olimpiade bahasa Jerman yang diadakan *Goethe Institute* di Jakarta maupun Bandung dan di berbagai kota lainnya. Institusi SMA PGRI I Bandung tercatat sebagai sekolah pertama di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan program pertukaran pelajar Jerman-Indonesia yang dilaksanakan atas kerjasama *Deutsch Pasch Schule* (Jerman) dan SMA PGRI I Bandung (Indonesia). Kontribusi positif sebagai sekolah mitra lintas negara memperlihatkan *trend* prestasi peserta didik khususnya yang berkaitan dengan bahasa Jerman, yang kerap melahirkan alumnus-alumnus berprestasi bahkan setelah menyelesaikan study SMA-nya.

El-Huda (www.kompasiana.com, 2015) menuliskan pengalamannya ketika belajar bahasa asing di pesantren Gontor yang merupakan lembaga pendidikan berbasis agama. Semua santrinya diwajibkan berbicara bahasa arab maupun bahasa inggris, “berbicara menggunakan bahasa Arab hukumnya wajib, seperti wajibnya solat”, seperti itu bunyi salah satu kata-kata mutiara penyemangat para santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo untuk giat belajar dan berlatih bahasa. Berikut kiat-kiat yang digunakan pondok pensantren gontor untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa para santrinya: Minggu bahasa merupakan strategi yang digunakan sebagai patokan jadwal berbahasa, berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Pergantian jadwal berbahasa ini diumumkan oleh bagian penerangan atau bagian pengumuman setelah selesai solat maghrib berjamaah di Masjid Jami’ Gontor, sehingga tidak ada *hujjah* atau alasan bagi para santri bahwa dirinya tidak mengetahui harus berbahasa apa pada suatu waktu tertentu (1); Berani berbahasa, salah bukanlah dosa. Keberanian

untuk berbicara, mengemukakan pendapat, ataupun berargumentasi adalah hal yang sangat didukung di Gontor, termasuk di dalamnya keberanian untuk mengemukakannya dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. (2); *Ilqoou Al-mufrodat* (pemberian kosa kata) dilakukan setiap pagi, setiap hari. Para santri diberi 3 kosa kata dan 3 kata-kata mutiara setiap harinya untuk dihafalkan. (3); Dinding, lemari, pintu, semuanya berbicara. Bila berkeliling gontor dan masuk ke asrama santri kita akan mendapati banyak sekali tempelan-tempelan berisi tulisan para santri (4); Membawa kamus dan kitab kemanapun. Tujuannya sederhana, supaya santri yang tidak tahu pengucapan suatu kata segera mencari dan mendapatkannya di kamus yang dibawa. (5); Hukuman atau sanksi, di Gontor memberlakukan sanksi bagi pelanggar disiplin bahasa dengan berbagai hukuman atau sanksi sebagai pemicu gelora semangat berbahasa santri (6).

Proses pembelajaran bahasa asing di sekolah formal maupun informal yang berbasis agama maupun umum memberikan pendidikan moral/nilai kepada peserta didik. Anak dilatih pada situasi yang menempatkan mereka untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada; produk sosial dan produk budaya berhasil membawa peserta didik memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai 'apa' yang seharusnya mereka anut.

Proses pembelajaran bahasa asing berikut implikasi praktisnya kepada individu memberikan gambaran adanya dialektika Nilai melalui proses "kemenjadian" peserta didik, yang berkembang secara individual namun berwawasan sosial. Konsistensi Nilai yang dibina menghadirkan individu yang memiliki karakter serta mental kuat untuk mengasah kemampuannya menjadi individu berprestasi. Pendidikan Nilai menjadi pondasi kuat dalam melahirkan seseorang yang bertanggung jawab terhadap pilihannya; menyadari kewajibannya, dan mau bekerja keras untuk meraihnya. Pelatihan pada situasi kompetisi yang sehat dan *fair* antar sesama peserta didik dalam rangka mendapatkan peluang mengikuti kejuaraan olimpiade bahasa dan berbagai tawaran beasiswa lainnya.

Pendidikan Nilai melalui pembelajaran bahasa asing menempatkan peserta didik pada sebuah realitas empiris di ranah etis individu. Dengan cara menumbuhkan nilai tanggung jawab terhadap pilihannya sendiri; tidak merugikan pihak lain; dan "pe-raih-annya" didasarkan pada hasil kerja kerasnya sendiri.

Paradigma nilai tanggung jawab yang dilandasi oleh kesadaran *ethics* yang kuat ditanamkan pada peserta didik. Dan yang lebih penting lagi, pendidikan nilai melalui pembelajaran bahasa asing dapat menghadirkan manusia Indonesia yang bermoral sekaligus menjawab optimisme bangsa untuk melahirkan manusia bermoral.

Sebagai salah satu langkah pembuktian ilmiah dalam kerangka mikro pendidikan; penelitian ini akan mengkaji, bagaimana implementasi Pendidikan Nilai melalui pembelajaran bahasa asing. Adapun mata pelajaran bahasa asing (bahasa Jerman) tingkat SMA/MA dipilih sebagai lokus penelitian proses Pendidikan Nilai dalam abstraksi sosial lingkup sekolah, instrumen metodologis pembelajaran, dan konstruksi dimensi *ethics* Nilai individu. Maka kajian penelitian ini berjudul, **“Implementasi Pendidikan Nilai Melalui Pembelajaran Bahasa Asing-Jerman (Studi Kelas X di SMA PGII I Bandung)”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada pemaparan di atas, maka konstruksi awal penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan besar, yaitu: “Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Nilai melalui Pembelajaran Bahasa Asing-Jerman di sekolah?” Dari konstruksi pokok tersebut, diturunkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Nilai apakah yang dikonstruksi melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung?
2. Bagaimanakah proses konstruksi Pendidikan Nilai melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung?
3. Bagaimanakah hasil proses konstruksi Pendidikan Nilai melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah gambaran komprehensif serta urgensi pembelajaran bahasa asing di dunia pendidikan khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).

Adapun tujuan penelitian ini secara rinci adalah:

1. Mendeskripsikan nilai yang dikonstruksi melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung
2. mendeskripsikan proses konstruksi pendidikan nilai melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung
3. Mendeskripsikan hasil proses konstruksi pendidikan nilai melalui pembelajaran bahasa asing-Jerman di SMA PGII I Bandung

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi dunia pendidikan dan program studi Pendidikan Umum/Nilai pada khususnya. Hasil kajian ini memberikan tiga manfaat umum:

1. Teoritis

Penelitian banyak menguraikan konstruksi-konstruksi Nilai yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kajian teori yang dikembangkan dalam penelitian diperoleh dari proses pendalaman secara interdisipliner. Terdapat kajian dari perspektif kewarganegaraan, filsafat, bahasa, psikologi, dan pendidikan.

Selain daripada itu kajian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan; baik secara makro maupun mikro, *wabil khusus* guna memperkaya dialektika ilmu Pendidikan Umum/Nilai dalam perspektif pembelajaran bahasa asing.

2. Praktis

- 2.1 Penerapan pola pembelajaran bahasa asing berbasis nilai
- 2.2 Kontribusi teoritik dalam kajian nilai
- 2.3 Kontribusi pada tataran dimensi konkret dialektika Nilai dalam dunia pendidikan
- 2.4 Promosi sekolah
- 2.5 Pembelajaran bahasa asing sebagai salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan pendidikan nilai